PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Jumat Tanggal: 02 Agustus 2019 Halaman: 14

CURHAT - Perwakilan pengurus KONI Kota Yogyakarta saat berkonsultasi dengan Sekjen KONI Pusat, Mayjen TNI Purn Nanang Djuana (tengah), di Kantor KONI Pusat, Jakarta, beberapa waktu lalu.

ISTIMEWA

# KONI Kota Yakini BAORI DIY Tak Punya Landasan Hukum

**YOGYA, TRIBUN** - Jajaran KONI Kota Yogyakarta terus berupaya memperjuangkan nasib kesembilan atletnya yang dinyatakan tak lolos verifikasi Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY 2019. Satu langkah yang diambil, yakni menjalin konsultasi dengan KONI Pusat.

Wakil Ketua Umum II KONI Kota Yogyakarta, Yoseph Junaidi mengungkapkan, konsultasi dilakukan untuk mencari kejelasan, terkait keberadaan Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) DIY atau daerah, yang dinilai tak memiliki landasan hukum.

Pada pertemuan di Kantor KONI Pusat, Jakarta, beberapa waktu lalu, perwakilan KONI Kota ditemui Sekjen KONI Pusat Demisioner, Mayjen TNI Purn Nanang Djuana, mewakili Ketua Umum, Marciano Norman.

Menurut Junaidi, pihak KONI Pusat menyatakan, bahwa hingga kini, BAORI hanya terdapat di KONI Pusat. Sehingga, BAORI tingkat daerah, keberadaannya dianggap tak pernah ada. Hal tersebut, lanjutnya, sesuai AD/ART KONI Pusat Pasal 41.

"Makanya, kemarin Pak Nanang juga kaget waktu dengar kalau ada BAORI Daerah di DIY, karena selama ini kan memang belum ada BAORI di daerah. Jadi, BAORI itu adanya ya di KONI Pusat," katanya, Kamis (1/8).

"BAORI di KONI Pusat itu punya majelis sendiri, bersifat independen, punya ruang sidang sendiri juga di lantai 11. Lalu, setiap sidangnya menghadirkan semua yang terlibat, mulai penggugat, tergugat, atlet hingga pengurus cabor," tambah Junaidi.

Melalui kesempatan tersebut, pihaknya pun sekaligus menyampaikan, bahwa tahapan verifikasi atlet Porda DIY tahun ini sudah menyalahi aturan. Sebab, sesuai Pedoman Organisasi (PO) KONI Pusat, Porda adalah turunan Pekan Olahraga Nasional (PON).

"PON itu tim verifikasi dibentuk KONI dan melibatkan beberapa cabor dan tuan rumah PON. Nah, lantaran Porda DIY itu turunan PON, jadi ya seharusnya aturannya sama," tandas Junaidi.

"Tapi, kemarin verifikasinya dilakukan sendiri KONI DIY tanpa melibatkan perwakilan KONI daerah, serta Pengda. Lalu, baru tahun ini juga, verifikasinya tak melibatkan peserta dan tuan rumah," imbuhnya. **(aka)**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak |
|---|---|---|---|

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 1. Dinas Pemuda dan Olahraga | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 17 Januari 2025
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**
NIP. 19690723 199603 1 005